

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Sampang, bahkan menjadi bencana yang sering terjadi hampir setiap tahun ketika sudah memasuki musim hujan.¹ berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan permasalahan banjir yang paling sering terjadi di Kabupaten Sampang di karenakan jumlah aliran air yang masuk begitu besar sehingga akumulasi aliran (flow accumulation) begitu tinggi.²

Permasalahan banjir yang terjadi di Kabupaten Sampang pada setiap tahun sepanjang musim hujan merupakan suatu kegagalan Pemerintah, hal ini dikarenakan Pemerintah tidak sanggup dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan banjir. Sepanjang tahun banjir merupakan suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Sampang. Permasalahan ini merupakan suatu gejala Politik, dimana problem Politik ini timbul karena kurangnya peran Pemerintah dalam menangani permasalahan yang terjadi. Penataan lingkungan yang kurang tepat adalah salah satu kegagalan Pemerintah yang pada akhirnya membuat bencana banjir masih terus terjadi, selain itu strategi dari Pemerintah dalam pengalokasian Sumber Daya Alam

¹ Kurnia Darmawan, Hani'ah, and Andri Suprayogi. *Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Di Kabupaten Sampang Menggunakan Metode Overlay Dengan Scoring Berbasis Sistem Informasi Geografis*, Jurnal Geodesi Undip, 6 (2017).

² Nanik Suryo Haryani dkk. *Model Bahaya Banjir Menggunakan Data Penginderaan Jauh Di Kabupaten Sampang (Flood Hazard Model Using Remote Sensing Data in Sampang District)*, Jurnal Penginderaan Jauh, 9.1 (2012).

yang kurang tepat sasaran. Perlu adanya Pembangunan dan Perbaikan dalam Penanganan permasalahan bencana ini.

Rapuhnya Pondasi Politik Lingkungan juga andil dimana kegagalan Pemerintah dalam penanganan banjir, hal ini dapat dilihat dari bagaimana input dan output Politik yang dimana kebanyakan belum bersentuhan dengan kepentingan rakyat yang kurang mementingkan dan mempedulikan kondisi lingkungan. Karena apabila Pemerintah memperhatikan permasalahan banjir yang terjadi, seharusnya dengan permasalahan yang selalu terjadi dari bertahun-tahun sebelumnya Pemerintah dapat mengambil tindakan penyelesaian dalam permasalahan ini.

Penyebab utama terjadinya banjir di Kabupaten Sampang adalah intensitas hujan yang lebat dan terus menerus terjadi, penggundulan hutan di daerah utara sehingga tidak adanya resapan dan ditambah dengan peluapan Sungai Kemuning menjadi faktor penyebab semakin parahnya banjir yang terjadi.

Selain itu kondisi geografis pada Kecamatan Sampang yang berbentuk lembah berada pada ketinggian 80 cm dibawah permukaan laut dengan beberapa wilayah disekitarnya yang lebih tinggi seperti Desa Gunung Maddah, Desa Panggung, Dan Kecamatan Omben yang menjadi penyumbang terjadinya Banjir di Kecamatan Sampang. Apabila intensitas curah hujan pada daerah tersebut tinggi, dan air laut dalam keadaan pasang, maka banjir yang menimpa Kecamatan Sampang akan sulit untuk cepat surut. Penyebab utama terjadinya banjir di Kabupaten Sampang adalah intensitas hujan yang lebat dan terus menerus terjadi, penggundulan hutan di daerah utara sehingga tidak

adanya resapan dan ditambah dengan peluapan Sungai Kemuning menjadi factor penyebab semakin parahnya banjir yang terjadi.

Intensitas debit air pada musim penghujan meningkat, seiring dengan adanya penurunan daya tampung palung sungai yang disebabkan erosi pada daerah hulu hingga daerah hilir DAS yang mengakibatkan terjadinya sedimentasi pada dasar sungai dan juga penyempitan pada daerah kanan-kiri badan sungai terlebih pada muara sungai, hal ini mengakibatkan terjadinya penghambatan proses pengaliran air dari badan sungai hingga muara sungai.³

Penanggulangan bencana merupakan bagian dari serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh Pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (emergency response). Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi fokus rekontruksi dan rehabilitasi dari pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana dalam Anggaran dan Belanja Negara yang memadai dan siap pakai dalam rekontruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

³ Mizun Bariroh Anis, dkk.V.S. 2017. *Kolam Tampungan Sebagai Bangunan Pengendali Genangan Di Kecamatan Sampang* , Jurnal Teknik Pengairan hlm 40-42

Adapun Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan Kebijakan Pembangunan Nasional.
2. Penetapan status dan tingkatan bencana Nasional dan Daerah. Dengan melihat realita yang terjadi, penelitian ini penting untuk dilaksanakan, Karena berbagai macam penanggulangan dan upaya dilakukan guna Meminimalisir bencana banjir yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan instansi terkait baik itu Instansi Pemerintahan seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga pihak terkait yang memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sampang.
3. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.
4. Pembentukan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur- unsur kebijakan penanggulangan bencana.
5. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Negara lain, Badan-badan, atau Pihak-pihak Internasional lain.
6. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala Nasional.

7. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan Sumber Daya Alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan.⁴

Penanggulangan bencana khususnya pada tahap pasca bencana merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kembali baik sarana dan prasarana dalam bentuk fisik maupun non fisik. Pasca bencana merupakan bagian dari Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang memiliki berbagai macam tahapan dalam proses pemulihannya. Pasca bencana merupakan tahapan yang penting, hal ini dikarenakan akibat terjadinya bencana banjir yang perlu adanya penanganan, seperti perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat yang telah rusak, pemulihan kondisi social masyarakat terdampak banjir, pemulihan perekonomian masyarakat yang pastinya terganggu sebagai dampak dari bencana banjir, pemulihan psikologi masyarakat yang diakibatkan oleh bencana banjir.⁵

Tujuan dari penanggulangan bencana banjir adalah memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman bencana banjir, melaksanakan peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada, menjamin terlaksananya penanggulangan bencana banjir secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan

⁴ Sri Heryati, *“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana”*, Jurnal Pemerintah dan Keamanan Publik (JP dan KP) 2, no. 2, (Agustus:2020), 12. diakses dari <https://doi.org/>, pada 29 Maret 2023, 12.00 WIB

⁵ Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana*, diakses dari https://www.bnpb.go.id/Uplouds/Publication/info_Bencana_Februari, pada 29 maret 2023, 13:00 WIB

menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik dan swasta, dan mampu mendorong semangat gotong royong.⁶

Di berbagai peraturan pun, beberapa kali kegiatan penanggulangan bencana banjir ini diatur untuk meminimalisir risiko banjir yang terjadi bahkan yang paling jelas dampak hukumnya apabila kegiatan ini dilakukan dan dapat terealisasi dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sampang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Dengan adanya Perda tersebut mengatur tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memiliki dampak atau konsekuensi Hukum yang harus dihadapi ketika melanggar Perda itu, kemudian dengan adanya Peraturan Daerah itu maka Pemerintah Daerah lebih mudah dalam mengaplikasikan beberapa usaha untuk menanggulangi kegiatan penanggulan tersebut.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan bencana banjir di Kabupaten Sampang yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat namun Pemerintah Daerah juga berwenang atas

⁶ Henrika riantika. (2021). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang*, diakses dari https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13537-Full_Text.pdf, pada 12 Juni 2023, 14:00 WIB

Kebijakan dan Strategi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sampang, yang pada fakta di lapangan tidak berjalan secara maksimal.⁷

Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Melakukan berbagai cara dalam rangka penanggulangan bencana banjir. Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan pihak yang memegang tanggung jawab penuh didalam pelaksanaan manajemen penaggulangan bencana. Berdasarkan pada Undang - Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terdapat dalam Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana daerah mengatakan bahwa menejemen penanggulangan bencana daerah itu meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, respon atau daya tanggap, serta pemulihan.⁸ Tahapan penanggulangan bencana tertuang didalam Struktur kerja yakni bidang pertama merupakan pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedua merupakan kedaruratan dan logistik, serta bidang ketiga yakni Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Masing- masing dari bidang tersebut memiliki Tugas pokok dan fungsinya yang berbeda dalam penanggulangan bencana yang terjadi.

Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan berbagai cara dalam rangka penanggulangan banjir, BPBD

⁷ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

sampang juga membentuk tim gabungan yang terdiri dari Instansi terkait dan juga Petugas keamanan di Sampang.⁹

Berangkat dari uraian permasalahan tersebut maka Saya tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pertanggung Jawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Sampang”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Tugas Dan Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk Mengetahui Bagaimana Seharusnya Implementasi Tugas Dan Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Sampang
- b) Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggung Jawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Sampang

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

⁹ fendi irawan Sirapati. (2015). *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Korban Bencana Banjir Di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 3.4,958.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan terutama mengenai Implementasi Tugas Dan Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Sampang dan memberikan kontribusi bagi penulis, instansi maupun pihak yang bersangkutan untuk dijadikan bahan referensi dalam mengkaji masalah – masalah khususnya tentang penanggulangan banjir

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan bisa memberikan pengkajian dalam upaya Pertanggung jawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dan menjadi informasi bagi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sampang, khususnya bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini, penelitian ini dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sampang.

1.5 Keaslian Penelitian

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan di tulis, berikut di sajikan dalam bentuk tabel, tabel memperlihatkan keaslian penulis dengan penulis sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 1
Daftar Penulisan Sebelumnya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Siti Talitha Rachma, Univer sitas Brawijaya Malang Fakultas Teknik, Tahun 2018.	Studi Penentuan Sebaran Daerah Terdampak Banjir di DAS Kali Kemuning Kabupaten Sampang Menggunakan Aplikasi Hec-Ras v5.0	Skripsi ini membahas Terkait Perencanaan Pengembangan wilayah sungai kemuning dengan menggunakan analisa aplikasi Hec-Ras v5.0	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis dalam hal Menambah wawasan terhadap Banjir yang terjadi di sekitar kali kemuning dengan menggunakan analisa aplikasi Hec-Ras v5.0.
2.	Andri Puji Wahyudi, Universitas Brawijaya, Fakultas	Studi Perencanaan Retarding Basin di Kali Gunung Maddah Sebagai Usaha	Skripsi ini membahas tentang penanggulangan banjir di kota sampang dengan	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis menambah wawasan dan kepada peneliti

	Teknik, Tahun 2015	Menanggulangi Banjir Di Kota Sampang Madura	Pengendalian Retarding Basin di Kali Gunung Maddah	selanjutnya sebagai informasi terhadap Penanggulangan Banjir di Kota Sampang disekitar Kali Gunung Maddah dengan Pengendalian Basin
3.	Henrika Riantika, Universitas Muhammadiyah Makassar Ilmu Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2021	Peran Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang	Skripsi ini membahas tentang PeranPenanggulanga n Bencana Daerah (BPBD)dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Lewaja	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam menambah pengetahuan terhadap PeranPenanggulan gan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Adapun perbedaan Skripsi yang akan ditulis dengan contoh Skripsi terdahulu diatas adalah:

1. Penelitian yang ditulis oleh Siti Talitha Rachma mengkaji terkait Perencanaan pengembangan wilayah sungai Kemuning dengan menggunakan analisa aplikasi Hec-Ras v5.0, selain itu subjek dan penelitiannya berbeda, sedangkan tulisan Skripsi ini Pertanggung Jawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Sampang.
2. Penelitian yang ditulis oleh Andri Puji Wahyudi berbeda dengan Skripsi ini terdapat pada objek yang diteliti, dimana pada penulisan Skripsi tersebut Objeknya adalah Pengendalian Retarding Basin di Kali Gunung Maddah dalam Pengkajian, Menanggulangi banjir di Kota Sampang Madura. Kemudian pada Skripsi ini mengkaji bentuk Pertanggung Jawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota sampang.
3. Penelitian yang ditulis oleh Henrika Riantika dengan Tema Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang di satu sisi Tema yang dikaji yaitu tentang Efektifitas BPBD dalam mengatasi banjir, sedangkan Penulis dalam Skripsi ini lebih berfokus kepada bentuk Pertanggung Jawaban BPBD Kabupaten Sampang dalam bentuk Penyelesaian terhadap

Bencana Banjir yang terjadi di Kota Sampang.

1.6 Metode Penelitian

Metode dapat diartikan yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dari teknik penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Secara lebih lanjut, kegiatan penelitian dimulai apabila seorang ilmuwan melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode. Dapat disimpulkan bahwa metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁰

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam Penulisan Hukum ini adalah jenis Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris berorientasi pada Hasil Penelitian di Lapangan. Penelitian Hukum Empiris yaitu pendekatan dilakukan Penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan Peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif dengan maksud tujuan karena peneliti ingin melakukan penelitian secara mendalam. Metode penelitian kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Penelitian ini bersifat Deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan

¹⁰ Soerjono Soekanto, (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali Pers), hlm.6

bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semuanya yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.¹¹

Dari pendekatan penelitian Kualitatif di atas berdasarkan tujuan penelitian yang ingin melihat bagaimana Pertanggung Jawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Sampang.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dalam menemukan data-data secara objektif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan Observasi (pengamatan), Interview (wawancara), dan Dokumentasi.¹²

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terarah terhadap gejala pada objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mendapat informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat, (ruang), pelaku, objek, kegiatan, perbuatan atau peristiwa. Observasi dilakukan secara langsung di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang tentang permasalahan yang berhubungan

¹¹ *Ibid.*, hal.11

¹² Prof.Dr.Sugiyono. **Metode Penelitian Pendidikan**. (Bandung: Alfabeta, 2014),hlm.308.

dengan penelitian dan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis atau hasil observasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan – keterangan.

Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.

1. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
2. Wawancara semi terstruktur jenis wawancara ini sudah termasuk dalam katagori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas di bandingkan dengan wawancara terstruktur.
3. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹³

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

¹³ Prof.Dr.Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2014)

dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁴

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan dalam menganalisis data mengenai hal-hal atau variabel-variabel benda tertulis (catatan) seperti buku-buku, Dokumen Peraturan-peraturan, dan sebagainya.

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis Data sebagai bagian dari isi Penelitian, mendasarkan analisisnya dari Data yang disajikan. Menganalisis Data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam Penelitian. Dalam menganalisis Data, Penulis menggunakan teknik analisis Data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data atau data reduction dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.¹⁵ Reduksi Data merupakan suatu bentuk analisis dengan memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kemudian dicari temanya. Data yang sudah direduksi

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 329

¹⁵ Prof.Dr.Sugiyono. **Metode Penelitian Pendidikan**. (Bandung: Alfabeta, 2014)

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari Data.

2. Penyajian Data

Penyajian Data atau Display Data adalah menyajikan Data kedalam bentuk matriks, grafik, jaringan, bagan dan sebagainya.¹⁶ Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami dengan demikian, Peneliti dapat menguasai Data dan tidak terbenam dengan setumpuk Data.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi merupakan kegiatan di akhir Penelitian Kualitatif dengan menemukan temuan baru berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek dengan jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹⁷ Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Dengan memperjelas Data yang diperoleh, Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan Data.¹⁸

¹⁶ Dr.Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

¹⁷ Prof.Dr.Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2014)

¹⁸ Dr.Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008)